

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
INTISARI.....	xvii
ABSTRAKSI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Keaslian Penelitian.....	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kebijakan Publik.....	15
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.3 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	22
1. Pendekatan Atas-Bawah (<i>Top-Down Approach</i>).....	22
2. Pendekatan Bawah-Atas (<i>Bottom-Up Approach</i>).....	24
3. Pendekatan Hibrida (<i>Hybrid Approach</i>).....	27
2.4 Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni	
1. Pembangunan Perumahan.....	33
2. Pembangunan Rumah Layak Huni.....	36
2.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rumah	
Layak Huni.....	38
1. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan.....	38
2. Partisipasi Masyarakat Sebagai Refleksi Modal Sosial.....	46
a. Kepercayaan.....	48
b. Kohesivitas.....	50
c. Altruisme atau Perasaan Tidak Egois dan	
Individualistik.....	51
d. Gotong Royong.....	52
e. Jaringan dan Kolaborasi Sosial.....	54
3. Manifestasi Modal Sosial dalam Pembangunan	
Masyarakat Tradisional.....	57

4.	Bentuk dan Keefektifan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Rumah Layak Huni.....	61
a.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan.....	63
b.	Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi.....	63
c.	Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Kebijakan.....	64
2.6	Keefektifan Implementasi Program Pembangunan Rumah Layak Huni.....	67
1.	Faktor Pemerintah.....	67
a.	Komunikasi.....	68
b.	Sumber Daya.....	69
c.	Disposisi.....	70
d.	Struktur Birokrasi.....	72
2.	Faktor Masyarakat.....	74
a.	Penyimpangan Prosedur Penentuan Penerima bantuan.....	74
b.	Keengganan Penerima bantuan Untuk Berpartisipasi.....	76
2.7	Kerangka Pikir.....	77
2.8	Fokus Penelitian.....	79
BAB III METODE PENELITIAN.....		88
3.1	Jenis Penelitian.....	88
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	91
3.3	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.4	Teknik Penentuan Informan.....	96
3.5	Konsep dan dan Indikator Penelitian.....	97
3.6	Instrumen Penelitian.....	98
3.7	Teknik Analisa Data.....	99
3.8	Jalannya Penelitian Lapangan.....	101
3.9	Hambatan Penelitian Lapangan.....	107
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN.....		112
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	112
1.	Keadaan Geografis.....	112
2.	Keadaan Topografi dan Iklim.....	114
3.	Keadaan Pemerintahan.....	116
4.	Keadaan Demografis.....	118
5.	Keadaan Pendidikan, Kesehatan, dan Agama.....	119
6.	Kondisi Ekonomi.....	120
7.	Keadaan Sarana dan Prasarana.....	124
4.2	Deskripsi Objek Penelitian.....	125
1.	Lahan Permukiman dan Pengembangan Wilayah.....	127
2.	Kondisi, Karakteristik dan Kebutuhan Rumah.....	129
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DENGAN PENDEKARAN HIBRIDA.....		137
5.1	Implementasi kebijakan Pembangunan RLH.....	137
5.1.1	Kondisi Rumah Kurang Layak Huni Masyarakat Supiori	142
5.1.2	Kebijakan Pembangunan RLH.....	148
5.1.3	Dasar dan Standar Pembangunan RLH.....	153
5.1.4	BPMPK Sebagai Pelaksana Pembangunan RLH.....	160

5.1.5	Pengelolaan Dana Pembangunan RLH.....	169
5.2	Partisipasi Masyarakat Berbasis Modal Sosial dalam Pembangunan RLH.....	184
5.2.1	Ruang Partisipasi Masyarakat Sebagai Refleksi Pendekatan Hibrida.....	184
5.2.2	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Berbasis Modal Sosial.....	191
1.	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Program...	191
2.	Keterlibatan Masyarakat dalam Musyawarah Kampung (Muskam).....	197
3.	Keterlibatan Masyarakat dalam Penyediaan Material..	201
4.	Keterlibatan Tenaga Lokal.....	208
5.	Keterlibatan Masyarakat dalam Manajemen Konflik Sosial.....	213
6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Gotong Royong.....	220
7.	Keterlibatan Masyarakat dalam Koordinasi dan Pengawasan Lapangan.....	223
8.	Keterlibatan Masyarakat dalam Dokumentasi dan Pelaporan Kegiatan.....	229
5.2.3	Modal Sosial Sebagai Basis Partisipasi Masyarakat Supiori.....	232
5.3	Analisis Penerapan Pendekatan Hibrida dalam Pembangunan RLH.....	242
1.	Kepercayaan Masyarakat.....	245
2.	Kohesivitas Masyarakat.....	247
3.	Altruisme Masyarakat.....	249
4.	Gotong Royong Masyarakat.....	250
5.	Jaringan dan Kolaborasi Sosial Masyarakat.....	252
5.4	Kesimpulan.....	255
BAB VI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANG- UNAN RLH DI KABUPATEN SUPIORI.....		258
6.1	Capaian Pembangunan RLH.....	258
1.	Distrik Supiori Timur.....	263
2.	Distrik Kepulauan Aruri.....	267
3.	Distrik Supiori Selatan.....	277
4.	Distrik Supiori Barat.....	282
5.	Distrik Supiori Utara.....	284
6.2	Manfaat Pembangunan RLH.....	287
1.	Manfaat Kesejahteraan dari Pembangunan RLH.....	287
2.	Manfaat Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan RLH	301
3.	Manfaat Pengembangan Wilayah dari Pembangunan RLH..	305
6.3	Dinamika Efektifitas Implementasi Kebijakan Pembangunan RLH.....	319
6.4	Analisis Efektifitas Implementasi Kebijakan Pembangunan RLH.....	338

6.5	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas	
	Pembangunan RLH.....	352
6.5.1	Faktor Pemerintah.....	354
	1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan.....	355
	2. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan.....	363
	3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan.....	369
	4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan.....	373
6.5.2	Faktor Masyarakat.....	378
	1. Pengutamaan Kerabat.....	378
	2. Salah Sasaran Penerima Bantuan.....	380
	3. Penyimpangan Prosedur Penentuan Penerima Bantuan	383
	4. Ketidakhadiran Penerima Bantuan dalam Acara	
	Sosialisasi (MUSKAM).....	385
	5. Tidak Adanya partisipasi warga dan	
	Penerima Bantuan.....	386
	6. Tidak Menempati setelah RLH Terbangun.....	389
6.6	Kesimpulan.....	390
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		393
7.1	Kesimpulan.....	393
7.2	Implikasi Penelitian dan Kontribusi Teori.....	398
7.3	Rekomendasi.....	401
DAFTAR PUSTAKA.....		404
LAMPIRAN.....		411

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Fokus Kebijakan Perumahan dari 1950-an Sampai 2017.....	2
Tabel 2.1 Perbandingan Antara Partisipasi Sebagai Cara dan Sebagai Tujuan.....	44
Tabel 3.1 Konsep dan Indikator Penelitian.....	97
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Supiori.....	113
Tabel 4.2 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Wilayah.....	114
Tabel 4.3 Pelaksana Kegiatan Pembangunan RLH di Provinsi Papua, Termasuk di Kabupaten Supiori, 2013-2014.....	126
Tabel 4.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2015.....	133
Tabel 4.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita (m ²), 2015.....	134
Tabel 4.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2015.....	135
Tabel 4.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2015.....	135
Tabel 5.1 Tugas dan Fungsi dari Unsur PMPK dalam Program Pembangunan RLH Kabupaten Supiori.....	165
Tabel 5.2 Pelaku dan Peran Pengelolaan Penggunaan Dana BLM.....	182

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	78
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	92
Gambar 4.1 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdalaman di Kabupaten Supiori.....	130
Gambar 4.2 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Supiori.....	130
Gambar 4.3 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Supiori.....	131
Gambar 4.4 Kondisi Rumah Orangtua Bupati Supiori (Periode 2011- 2014) Fredrik Manufandu.....	132
Gambar 5.1 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdalaman di Kabupaten Supiori.....	142
Gambar 5.2 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Supiori.....	144
Gambar 5.3 Kondisi Umum RLH Masyarakat Perdesaan di Kabupaten Supiori.....	145
Gambar 5.4 Kondisi Rumah Orangtua Bupati Supiori (Periode 2011- 2014) Fredrik Manufandu.....	147
Gambar 5.5 Disain RLH yang Dibangun di Kabupaten Supiori pada Tahun 2012 (Tampak Belakang dan Samping Kanan).....	156
Gambar 5.6 Disain RLH yang Dibangun di Kabupaten Supiori pada Tahun 2012 (Tampak Belakang dan Samping Kiri).....	157
Gambar 5.7 Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Supiori.....	163
Gambar 5.8 Mekanisme Penyaluran Dana BLM dalam Pembangunan Rumah Layak Huni.....	174
Gambar 5.9 Penerapan Pendekatan Hibrida dalam Implementasi Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori.....	243
Gambar 6.1 RLH Terbangun Optimal di Kampung Waryesi, Distrik Supiori Timur.....	265
Gambar 6.2 RLH Terbangun Optimal di Kampung Wafor, Distrik Supiori Timur.....	266
Gambar 6.3 RLH Terbangun Optimal di Kampung Yamnaisu, Distrik Kepulauan Aruri.....	268
Gambar 6.4 Kondisi Permukiman Rumah Panggung Tradisional di Perairan Dangkal Pinggir Laut Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri.....	270
Gambar 6.5 Rumah Panggung Terbangun Optimal di Perairan Dangkal Pinggir Laut Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri.....	272

Gambar 6.6 Rumah Panggung Terbangun Kurang Optimal di Perairan Dangkal Pinggir Laut Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri.....	274
Gambar 6.7 Kondisi Rumah Panggung Mangkrak di Perairan Dangkal Pinggir Laut Kampung Rayori, Distrik Kepulauan Aruri.....	275
Gambar 6.8 RLH Terbangun Optimal di Kampung Warbefondi, Distrik Supiori Selatan.....	278
Gambar 6.9 RLH Terbangun Optimal di Kampung Odori, Distrik Supiori Selatan.....	280
Gambar 6.10 RLH Terbangun Optimal di Kampung Amyas, Distrik Supiori Barat.....	283
Gambar 6.11 RLH Terbangun Optimal di Kampung Fanjur, Distrik Supiori Utara.....	285
Gambar 6.12 Kondisi Rumah Terbangun Tidak Termanfaatkan di Kampung Puwari, Distrik Supiori Barat.....	294
Gambar 6.13 Kondisi Rumah Terbangun Tidak Termanfaatkan di Kampung Wafor, Distrik Supiori Timur.....	296
Gambar 6.14 Kondisi Rumah Mangkrak di Kampung Amyas, Distrik Supiori Barat.....	297
Gambar 6.15 Kondisi Rumah Terbangun Tidak Termanfaatkan.....	298
Gambar 6.16 Pembangunan RLH Baru Diiringi Pembukaan Area Permukiman Baru Beserta Jaringan Fasilitas Umum yang Dibutuhkan.....	307
Gambar 6.17 RLH Dibangun di Pusat-Pusat Kegiatan Perkotaan atau Wilayah-Wilayah Menuju Pusat-Pusat Kegiatan Perkotaan	313
Gambar 6.18 Efektivitas Implementasi Pembangunan RLH di Kabupaten Supiori, 2012-2016.....	340

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
DAU	: Dana Alokasi Umum
BAMUSKAM	: Badan Musyawarah Kampung
BAPERKAM	: Badan Pemerintah Kampung
BPMPK	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
CRDP	: Comprehensive Rural Development Programme
DPKAD	: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
DPMPK	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
GMPK	: Gerakan Masyarakat untuk Pembangunan Kampung
HOK	: Hari Orang Kerja
IMF	: International Monetary Fund
KCP	: Kantor Cabang Pembantu
KSO	: Kerjasama Operasional
LPD	: Laporan Penggunaan Dana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi Cuci Kakus
MENKES	: Menteri Kesehatan
MKPP	: Musyawarah Kampung Perencanaan Kegiatan
MUSKAM	: Musyawarah Kampung
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OTSUS	: Otonomi Khusus
PD	: Pendamping Distrik
PEMILUKADA	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PERBUB	: Peraturan Bupati
PERMEN	: Peraturan Menteri
PjOK	: Penanggungjawab Operasional Kegiatan
PKSO	: Perjanjian Kerjasama Operasional
PPK	: Pusat-Pusat Kegiatan
PTO	: Petunjuk Teknis Operasional
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
REKSUS	: Rekening Khusus
RLH	: Rumah Layak Huni
RPD	: Rencana Penggunaan Dana
SATKER	: Satuan Kerja
SPPB	: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPKK	: Surat Penetapan Kepala Kampung/ Kelurahan
SPKSO	: Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
SPP	: Surat Permintaan Pembayaran
SPM	: Surat Perintah Membayar
TPKK	: Tim Pengelola Keuangan Kampung
UU	: Undang Undang